

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Transformasi mata pencaharian pasca Keramba Jaring Apung (KJA) menampilkan dirinya sebagai sebuah proses sosio-kultural yang jauh lebih dalam daripada sekadar pergantian teknik ekonomi. Proses ini berawal dari kehancuran ekologis (*tubo*) dipicu oleh model ekstraktif KJA yang pada masanya telah menggeser pola agraris tradisional dan melahirkan Program Mata Pencaharian Alternatif (MPA) sebagai respons kebijakan. Implementasi MPA yang mencakup dua bentuk utama yakni revitalisasi tradisi (seperti *mamukek* dan pertanian) dan diversifikasi baru (UMKM, peternakan) serta mekanisme dukungan pemerintah yang berupa bantuan modal, sarana dan pelatihan justru memperlihatkan kesenjangan antara retorika dan realitas.

Meski menggunakan bahasa partisipasi melalui pembentukan kelompok, pada praktiknya pendekatan yang dominan tetap bersifat *top-down*, proyek-proyekan dan charity-based. Partisipasi masyarakat seringkali tereduksi hanya pada posisi sebagai penerima bantuan atau peserta pelatihan, bukannya sebagai subjek aktif yang pengetahuan lokalnya menjadi fondasi perencanaan. Mekanisme akses bantuan yang terfragmentasi, mengutamakan kelompok terformalitas (ber-SK) dan sangat bergantung pada jalur politik seperti Dana Pokir/Aspirasi anggota dewan telah menciptakan dinamika patronase, kompetisi antarkelompok dan ekonomi bayangan (seperti penjualan kembali bantuan). Fasilitasi pemerintah yang tidak berkelanjutan dan kurang pendampingan teknis ini, alih-alih membangun kemandirian justru memperkuat ketergantungan baru dan mengikis modal sosial.

Kegagalan teknis berulang pada berbagai skema MPA, seperti kematian ayam KUB, kegagalan budidaya lele di kolam terpal dan sulitnya revitalisasi pertanian organik merupakan bukti nyata bahwa intervensi tersebut tidak menyentuh logika praktis, rasionalitas ekonomi dan konteks ekologis lokal yang dipahami secara tacit oleh masyarakat.

Namun, melalui lensa budaya terlihat bahwa inti persoalannya terletak pada pergulatan makna yang mendalam di tingkat komunitas dalam memandang program MPA. Di satu sisi, terdapat pengetahuan eksplisit yang diakui bersama tentang krisis lingkungan dan kebutuhan mendesak akan alternatif. Di sisi lain, terdapat pengetahuan tacit (terselubung) yang jauh lebih kuat dan terbentuk dari pengalaman puluhan tahun yang mengukuhkan KJA bukan hanya sebagai sumber pendapatan, melainkan sebagai simbol identitas, kemudahan dan kepastian ekonomi yang superior dibandingkan aktivitas pertanian atau nelayan tradisional yang dianggap lebih berat dan kurang menjanjikan.

Dialektika antara kedua lapisan pengetahuan inilah yang kemudian memecah respon terhadap partisipasi masyarakat menjadi spektrum yang kompleks yaitu penerimaan penuh oleh kelompok kecil yang terdesak secara ekonomi (karena ketidakmampuan menanggung risiko *tubo*), strategi hibrid atau ambil semua oleh kelompok menengah (yang memanfaatkan MPA sebagai safety net sambil mempertahankan KJA) serta penolakan keras oleh pemilik modal besar yang identitas ekonominya sudah menyatu dengan KJA dan memandang MPA sebagai gangguan terhadap tatanan yang telah mapan.

Oleh karena itu, jalan ke depan untuk transformasi yang benar-benar berkelanjutan dan adil di Danau Maninjau mensyaratkan sebuah reorientasi paradigma yang radikal. Pendekatan pembangunan harus bergeser dari model intervensi teknis yang bersifat permukaan menuju pendekatan dialogis yang sensitif secara kultural yang mampu menjembatani dan menghormati pengetahuan eksplisit negara dengan pengetahuan tacit masyarakat. Partisipasi masyarakat harus dimaknai secara otentik bukan sebagai metode untuk menggalang kepatuhan melainkan sebagai proses kolektif untuk bersama-sama merekonstruksi argumentasi budaya yang baru. Dalam argumentasi budaya baru ini nilai-nilai seperti kesabaran, keberlanjutan ekologis, keadilan sosial dan kearifan lokal (seperti yang terkandung dalam praktik *mamukek*) tidak lagi dipandang sebagai penghambat kemajuan melainkan sebagai fondasi ketahanan dan martabat yang hakiki.

Program alternatif harus dirancang bersama untuk menawarkan *viability* (kelayakan) ekonomi yang setara atau mendekati dengan sistem pendukung yang integral mulai dari produksi, pemasaran hingga pembiayaan yang bebas dari politik patronase. Dengan kata lain, transformasi hanya akan berhasil jika mampu menciptakan sistem sosio-ekonomi baru yang secara simultan bermartabat, berkeadilan dan selaras dengan daya dukung ekologis Danau Maninjau. Sintesis antara partisipasi yang memberdayakan dan sensitivitas budaya inilah yang akan mengubah MPA dari sekadar program bantuan menjadi jalan pemulihan kedaulatan masyarakat atas ruang hidup dan masa depannya sendiri, sehingga penyelamatan danau tidak lagi dilihat sebagai pengorbanan, melainkan sebagai investasi kolektif untuk keberlanjutan yang inklusif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis mencoba memberikan beberapa rekomendasi strategis yang dapat diajukan untuk memperbaiki implementasi Program MPA ke depan.

1. Rekomendasi untuk Program Mata Pencaharian Alternatif (MPA)

Program MPA perlu mengalami transformasi mendasar dari pendekatan yang bersifat *top-down*, parsial dan berjangka pendek menuju model yang partisipatif, kontekstual dan berkelanjutan. Desain program harus benar-benar lahir dari pemahaman mendalam terhadap kompleksitas hubungan masyarakat dengan Danau Maninjau yang tidak hanya bersifat ekonomi tetapi juga kultural, spiritual dan sosio-ekologis. Program harus mengintegrasikan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional seperti sistem kalender musiman dalam *mamukek*, praktik agroekologi tumpang sari dan etika resiprositas dengan alam sebagai inti dari intervensi, bukan sekadar pelengkap.

Selain itu, MPA harus dirancang sebagai sistem ekonomi yang viable dan berjejaring bukan sekadar kumpulan proyek bantuan yang terpisah. Ini berarti membangun rantai nilai yang utuh dari produksi, pengolahan hingga pemasaran yang inklusif. Misalnya dengan mengembangkan koperasi atau BUMNag yang profesional untuk produk olahan ikan, kerajinan eceng gondok dan hasil pertanian unggulan. Program juga perlu dilengkapi dengan sistem monitoring dan evaluasi partisipatif yang melibatkan masyarakat secara aktif untuk memastikan

akuntabilitas, fleksibilitas dan perbaikan berkelanjutan berdasarkan umpan balik dari tingkat akar rumput.

2. Rekomendasi untuk Pemerintah

Pemerintah perlu melakukan pergeseran paradigma dari pendekatan teknokratis-biokratis menuju pendekatan yang partisipatif, adil dan kontekstual. Keterlibatan masyarakat harus menjadi fondasi dengan menggunakan mekanisme musyawarah adat dan kelembagaan lokal (seperti *kerapatan nagari*, *ninik mamak*, dan alim ulama) dalam setiap tahapan program perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Pendampingan teknis dan manajerial yang berkelanjutan harus diutamakan dengan menyediakan fasilitator yang tidak hanya kompeten secara teknis tetapi juga paham dinamika sosial-budaya lokal. Pendampingan harus intensif hingga masyarakat benar-benar mandiri mencakup aspek produksi, pengolahan, pemasaran (termasuk digital) dan manajemen risiko usaha.

Pemerintah harus menjamin keadilan dan transparansi dalam kebijakan lingkungan, khususnya pembatasan dan pembongkaran Keramba Jaring Apung (KJA). Kebijakan harus berlaku adil bagi semua pelaku tanpa diskriminasi antara petambak kecil dan pemodal besar dengan penegakan hukum yang konsisten. Selain itu perlu integrasi kebijakan yang holistik yang menghubungkan MPA dengan program konservasi danau, pengembangan ekowisata yang sensitif budaya serta riset pengembangan potensi lokal (seperti bioekonomi dan energi terbarukan). Skema pendanaan harus didiversifikasi dan didepolitisasi dengan mengembangkan sumber inovatif seperti dana abadi konservasi, green bonds atau skema pembayaran

jasa lingkungan dan mengurangi ketergantungan pada dana aspirasi politik yang tidak berkelanjutan.

3. Rekomendasi untuk Masyarakat

Masyarakat perlu memperkuat agensi dan kapasitas kolektifnya sebagai subjek aktif pembangunan dengan mengorganisasikan diri secara lebih solid dalam kelompok-kelompok usaha (nelayan, tani, ternak, UMKM) yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada keadilan internal serta keberlanjutan ekologis. Kelompok harus menjadi wadah pembelajaran bersama, saling mendukung dan memperkuat posisi tawar di hadapan pemerintah dan pasar. Masyarakat harus secara aktif mendokumentasikan, merawat dan mengembangkan kearifan lokal serta pengetahuan ekologis tradisional yang telah terbukti adaptif seperti teknik *mamukek* yang selektif, sistem tumpang sari dan praktik konservasi berbasis komunitas. Pengetahuan ini harus menjadi dasar dialog setara dengan pengetahuan teknis dari luar.

Masyarakat perlu membangun kemandirian ekonomi dan ketahanan pangan lokal melalui diversifikasi usaha yang lebih terencana dan saling mendukung, misalnya dengan mengembangkan sistem pertukaran komoditas (barter) antarwarga yang telah beralih profesi sehingga mengurangi ketergantungan pada uang tunai dan pasar eksternal. Masyarakat harus secara kritis namun konstruktif terlibat dalam pengawasan kebijakan, menggunakan mekanisme pengaduan yang tersedia untuk melaporkan penyimpangan serta aktif dalam proses musyawarah perencanaan dan

evaluasi program untuk memastikan kebijakan benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan mereka.

